

# Kemenag Beri Penghargaan Pemerintah Daerah Pemerhati Guru PAI

Category: Nasional

written by Maulya | 03/12/2023



[Orinews.id](https://orinews.id) | **Bali** – Kementerian Agama RI memberi penghargaan Tanda Mata kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki komitmen mendukung pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam (PPG GPAI).

Pemberian penghargaan berlangsung di Bali, Sabtu (2/12/2023) dalam giat bertajuk “Harmoni Membangun Negeri”.

Sejumlah Pemerintah Daerah dinilai memiliki kepedulian dan komitmen terhadap penyelenggaraan PAI di sekolah. Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk pemberian dana hibah untuk proses pelaksanaan PPG bagi guru PAI yang lulus seleksi.

Ada sejumlah kategori penghargaan PAI 2022 dan 2023. Pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kategori sumbangsih

pembiayaan terbesar. Kedua, Kepala Bidang PAI/PAKIS/Pendis dengan Kategori Koordinasi terbaik dengan Pemerintah Daerah. Ketiga, LPTK PTKI dengan kategori prosentase kelulusan tertinggi.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, tantangan pembelajaran yang dinamis pada dasarnya menuntut setiap Guru PAI untuk mau membuka diri dengan ilmu baru. Menurutnya, guru PAI menjadi kata kunci untuk menghasilkan pendidikan agama Islam di sekolah yang bermutu dan berkualitas.

“Hal ini mengindikasikan bahwa menginvestasikan untuk kepentingan mutu dan profesionalitas Guru PAI adalah salah satu keniscayaan bagi seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, maupun guru itu sendiri,” tegasnya.

Untuk mewujudkan profesionalitas Guru PAI tersebut, Kemenag menyelenggarakan program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru PAI. Program ini menjadi peluang yang baik bagi Guru PAI dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam secara umum, sekaligus tantangan untuk menyiapkan berbagai hal dan dukungan terkait pelaksanaan PPG tersebut.

Dalam praktiknya, pelaksanaan PPG PAI membutuhkan komitmen semua unsur baik dari tingkat pusat, daerah, sampai tingkat satuan pendidikan. Untuk itu, kesepahaman antar seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan sangat diperlukan.

“Atas dasar itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para Kepala Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota yang selama ini telah berkontribusi dalam mendukung program PPG PAI,” ungkap Ramdhani.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, yang diwakili oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Muhammad Valiandra secara daring menyampaikan Kemendagri sepenuhnya mendukung peningkatan kualitas

pendidikan agama Islam. Kolaborasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri sudah berjalan cukup intens dalam melakukan kolaborasi dalam mengakselerasi target-target yang harus dicapai bersama.

“Dalam hal ini, kolaborasi terkait pendanaan baik dana APBN ataupun APBD. Khusus untuk masalah pendidikan Kemendagri akan memonitor dan mengawal alokasi anggaran sekurang-kurangnya 20%,” tutur Valiandra.

Putusan MK Terhadap UU 20 Tahun 2003 berbunyi bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” bebernya.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran APBD antara lain untuk madrasah, pondok pesantren pendidikan agama dan keagamaan termasuk guru, pengawas dan peserta didik di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur PAI, Amrullah melaporkan, kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI kepada Pemerintah Daerah tingkat

Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Bidang PAI/PAKIS/PENDIS, dan juga Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang selama ini telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam (PPG PAI).

Berdasarkan data Direktorat PAI, kata Amrullah, untuk Guru PAI yang belum mengikuti PPG mencapai 61% atau dengan jumlah guru sebesar 149.925 orang. Sementara itu, ketersediaan APBN setiap tahunnya hanya mampu mengakomodir sebanyak 5000 orang. Apabila angka 149.925 guru yang belum PPG dikalikan dengan biaya PPG tiap orang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), maka diperlukan anggaran penyelesaian PPG sebesar RP. 749.625.000.000,- (tujuh ratus empat puluh sembilan milyar, enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

“Tanpa ada berbagai kesiapan serta percepatan dukungan kebijakan dan anggaran, kondisi tersebut bisa menjadi masalah tersendiri yang kian membesar. Untuk itu, kontribusi Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pelaksanaan PPG Guru PAI sangat membantu pemenuhan kebutuhan tersebut,” ucapnya.

Pembiayaan Peserta PPG yang sudah diberikan oleh 198 Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui biaya APBD mulai tahun 2022 hingga tahun 2023 dengan jumlah total anggaran sebesar Rp 67.115.000.000 (enam puluh tujuh milyar, seratus lima belas juta rupiah) untuk pembiayaan PPG sebanyak 13.423 guru, dengan rincian:

Pada tahun 2022, total pembiayaan APBD untuk 4.460 guru sebesar Rp22.300.000.000 (dua puluh dua milyar, tiga ratus juta rupiah), kemudian untuk tahun 2023, total pembiayaan APBD kepada 8.963 guru sebesar Rp44.815.000.000 (empat puluh empat milyar, delapan ratus lima belas juta rupiah).

“Semoga tahun depan dan seterusnya semakin besar dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memberikan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan PPG Guru PAI di sekolah,”

harap Amrullah.

Hadir dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, yang diwakili oleh Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia, Sekretaris Ditjen Pendis, dan Pejabat Eselon Tiga dan Empat serta Pejabat Fungsional di lingkungan Ditjen Pendis, Dekan FTIK PTKI se-Indonesia, serta para Kepala Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS se-Indonesia.

Berikut daftar pemenang berdasarkan masing-masing kategori:

**Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kategori sumbangsih pembiayaan TERBESAR pada 2022 dan 2023**

Batch 1

1. Kota Banjarmasin, jumlah 202 peserta PPG, dengan total anggaran Rp 1,010,000,000
2. Kota Bandung, jumlah 200 peserta PPG, dengan total anggaran Rp 1,000,000,000
3. Kabupaten Semarang, jumlah 200 peserta PPG, dengan total anggaran Rp 1,000,000,000
4. Kota Cilegon, jumlah 142 peserta PPG, dengan total anggaran Rp 710,000,000
5. Kabupaten Berau, jumlah 136 peserta PPG, dengan total anggaran Rp 680,000,000

Batch 2

1. Kabupaten Bandung, jumlah 800 peserta PPG, dengan total anggaran Rp 4,000,000,000
2. Kabupaten Malang, jumlah 484 peserta PPG, dengan total anggaran Rp 2,420,000,000
3. Kabupaten Karanganyar, jumlah 245 peserta PPG, dengan total anggaran Rp 1,225,000,000
4. Kabupaten Pasaman Barat, jumlah 242 peserta PPG, dengan

total anggaran Rp 1,210,000,000

5. Kabupaten Sukoharjo, jumlah 241 peserta PPG, dengan total anggaran Rp 1,205,000,000

### **Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Layanan Terbaik**

1. Bupati Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah
2. Wali Kota Bandung Jawa Barat
3. Wali Kota Salatiga Jawa Tengah
4. Bupati Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan
5. Wali Kota Malang Jawa Timur
6. Bupati Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta

### **Kategori Kepala Bidang PAI/PAKIS/Pendis dengan Koordinasi TERBAIK dengan Pemerintah Daerah pada 2022 dan 2023**

#### Tahun 2022

1. Aceh, jumlah penerima bantuan 515, dengan jumlah bantuan Rp 2,575,000,000
2. Kalimantan Timur, jumlah penerima bantuan 389, dengan jumlah bantuan Rp 1,945,000,000
3. Bengkulu, jumlah penerima bantuan 340, dengan jumlah bantuan Rp 1,700,000,000
4. Jawa Barat, jumlah penerima bantuan 330 1,650,000,000
5. Jawa Tengah, jumlah penerima bantuan 303 1,515,000,000

#### Tahun 2023

1. Jawa Barat, jumlah penerima bantuan 1,476, dengan jumlah bantuan Rp 7,380,000,000
2. Jawa Tengah, jumlah penerima bantuan 1,378, dengan jumlah bantuan Rp 6,890,000,000
3. Sumatera Selatan, jumlah penerima bantuan 757, dengan jumlah bantuan Rp 3,785,000,000
4. Jawa Timur, jumlah penerima bantuan 751, dengan jumlah bantuan Rp 3,755,000,000
5. Kalimantan Selatan, jumlah penerima bantuan 641, dengan

jumlah bantuan Rp 3,205,000,000

## **LPTK PTKI dengan kategori prosentase kelulusan TERTINGGI pada 2022 dan 2023**

### Tahun 2022

1. UIN Sunan Gunung Djati, dengan prosentase kelulusan 98.55%, jumlah peserta PPG 1,037
2. UIN Sunan Kalijaga, dengan prosentase kelulusan 96.39%, jumlah peserta PPG 803
3. UIN Raden Mas Said Surakarta, dengan prosentase kelulusan 96.08%, jumlah peserta PPG 536
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan prosentase kelulusan 95.98%, jumlah peserta PPG 423
5. UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dengan prosentase kelulusan 95.12%, jumlah peserta PPG 410
6. UIN Walisongo Semarang, dengan prosentase kelulusan 95.01%, jumlah peserta PPG 561

### Tahun 2023

1. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan prosentase kelulusan 97.03%, jumlah peserta PPG 101
2. UIN Salatiga, dengan prosentase kelulusan 93.88%, jumlah peserta PPG 245
3. UIN Maulana Malik Ibrahim, dengan prosentase kelulusan 93.22%, jumlah peserta PPG 339
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan prosentase kelulusan 93.18%, jumlah peserta PPG 176
5. IAIN Ponorogo, dengan prosentase kelulusan 92.90%, jumlah peserta PPG 155
6. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dengan prosentase kelulusan 92.65%, jumlah peserta PPG 204.